

Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlomulyo Temanggung

Lilis Sri Harningsih*, Nurkolis, I Made Sudana

Manajemen Pendidikan, Pascasarjana, Universitas PGRI Semarang
Jl. Lingga No. 4 – Dr. Cipto, Semarang, Indonesia

*E-mail: lilissriharningsih@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang program sekolah penggerak, baru 5 sekolah yang mengimplementasikan program di kabupaten Temanggung. Hal ini mendorong penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Tlogomulyo sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1. Keunikan yang merupakan kelebihan SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung adalah semangat dari seluruh warga sekolah dalam menerapkan setiap ada kebijakan baru, meskipun sekolah berada di wilayah kecamatan. Dengan komunikasi yang baik oleh kepala sekolah mampu meyakinkan warga sekolah untuk ikut berperan menjadi agen perubahan mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sekolah penggerak.

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai data pendukung. Proses analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Tlogomulyo secara realita telah mengimplementasikan kebijakan dan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar yang telah berjalan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung melalui lima intervensi: (a) Pendampingan konsultatif dan asimetris (b) Penguatan SDM (c) Pembelajaran dengan paradigma baru (d) Perencanaan berbasis, (e) Digitalisasi sekolah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Merdeka Belajar

Abstract

Based on government policy regarding the driving school program, only 5 schools have implemented the program in Temanggung district. This prompted this research to be carried out at SMP Negeri 1 Tlogomulyo as one of the implementers of the 1st generation driving school program. The unique advantage of SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung is the enthusiasm of all school members in implementing every new policy, even though the school is in a sub-district area. With good communication by the school principal, he is able to convince the school community to take part in becoming agents of change in achieving educational goals.

The aim of this research is to describe communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of driving school policies.

Data collection through observation, interviews and documentation studies as supporting data. The data analysis process goes through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. To check the validity of the data, researchers used the triangulation method.

The results of the research show that SMP Negeri 1 Tlogomulyo has actually implemented the policy and how to implement the policy of the driving school program within the independent learning framework which has been running for 3 years at SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung through five interventions: (a) Consultative and asymmetric assistance (b) Strengthening human resources (c) Learning with a new paradigm (d) Based planning, (e) Digitalization of schools.

Keywords: Implementation, Policy, Freedom of Learning

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Satuan

Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak menetapkan bahwa Kepala SMP Negeri 1 Tlogomulyo sebagai salah satu Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan I di kabupaten Temanggung. Hal ini tidak lepas dari kondisi SMP Negeri 1 Tlogomulyo yang sudah menunjukkan prestasi baik akademik dan non akademik, sebagai juara dari berbagai kejuaraan di tingkat kabupaten. SMP Negeri 1 Tlogomulyo juga merupakan sekolah Adiwiyata Nasional, serta kepala sekolah menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program sekolah penggerak. Tidak hanya itu beberapa sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka melaksanakan studi tiru di SMP Negeri 1 Tlogomulyo. Kepala SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung mengawali dengan membentuk komunitas praktisi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui 5 sebagai berikut:

1) Pendampingan Konsultatif dan Asimetris,

Pendampingan diberikan kepada SMP Negeri 1 Tlogomulyo berupa kemitraan antara Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Temanggung. Pendampingan program sekolah penggerak seperti fasilitasi dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencari solusi terhadap kendala lapangan pada saat implementasi program.

2) Penguatan SDM,

Pelatih ahli memberikan penguatan SDM direalisasikan dengan memberikan penguatan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru melalui PMO (Project Management Office), yang mengawal Program Sekolah Penggerak meliputi mengevaluasi, mereview dan merefleksi. Jenis pelatihan yang diberikan berupa: IHT (In House Training) tentang kurikulum merdeka, implementasi pembelajaran dalam kerangka merdeka belajar, dan lokakarya tingkat kabupaten, selain itu juga diberikan penguatan dan pendampingan terkait implementasi teknologi, platform pengembangan kompetensi dan profil guru, platform pemberdayaan guru, platform sumber daya sekolah, dan platform rapor pendidikan.

3) Pembelajaran Paradigma Baru,

Guru merancang pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru berbasis pada profil pelajar pancasila melalui program intrakurikuler dan kokurikuler.

Pembelajaran paradigma baru pada program intrakurikuler dapat dipelajari melalui pembelajaran terdiferensiasi dengan capaian pembelajaran yang disederhanakan sehingga siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru pun dapat leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Sedangkan pada program kokurikuler, pembelajaran paradigma baru dapat dipelajari melalui lintas mata pelajaran, kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas yang melibatkan masyarakat, serta muatan lokal yang dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global

4) Perencanaan berbasis data.

Secara terprogram perencanaan berbasis data diwujudkan melalui program manajemen berbasis sekolah dimana sekolah membuat perencanaan berdasarkan refleksi sekolah. Bahan refleksi diri sekolah berasal dari laporan sekolah yang potret kondisi mutu pendidikan. Setelah melakukan refleksi diri, sekolah membuat perencanaan program perbaikan dikaji lebih lanjut pada sesi pendampingan oleh pelatih ahli.

5) Digitalisasi sekolah.

Kemendikbudristek melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memberikan pendampingan penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized. Platform-platform tersebut terdiri dari platform guru untuk profil dan pengembangan kompetensi, platform guru untuk pembelajaran, platform sumber daya sekolah, dan dashboard rapor pendidikan

Untuk mewujudkan merdeka belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah tetapi perlu dukungan seluruh warga sekolah. Keunikan yang merupakan kelebihan SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung adalah semangat dari seluruh warga sekolah dalam menerapkan setiap ada kebijakan baru, meskipun sekolah berada di wilayah kecamatan. Dengan komunikasi yang baik dari kepala sekolah mampu meyakinkan warga sekolah untuk ikut berperan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang program sekolah penggerak, baru 5 sekolah yang mengimplementasikan program di kabupaten Temanggung. Hal ini mendorong penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Tlogomulyo sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1. Keunikan yang merupakan kelebihan SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung adalah semangat dari seluruh warga sekolah dalam menerapkan setiap ada kebijakan baru, meskipun sekolah berada di wilayah kecamatan. Dengan komunikasi yang baik dari kepala sekolah mampu meyakinkan warga sekolah untuk ikut berperan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan deskripsi kelebihan yang dimiliki oleh kepala sekolah dan SMP Negeri 1 Tlogomulyo tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta yang ada dari hasil observasi saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung. Penelitian ini juga didasarkan pada identifikasi bahwa penelitian tentang implementasi kebijakan program sekolah penggerak dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar. SMP Negeri 1 Tlogomulyo sebagai salah satu sekolah penggerak angkatan 1 yang terletak di pedesaan tepatnya di kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung telah berhasil melaksanakan program sekolah penggerak dan saat memasuki periode ketiga melalui Blended Learning dan proyek berkelanjutan terintegrasi dengan habituasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Hal ini juga ditunjukkan beberapa sekolah IKM di kabupaten Temanggung telah melakukan studi tiru di SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sukmadinata (2011:73) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Proses penelitian menurut Moleong (2012: 127) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: (1) tahap pra lapangan atau Orientasi, (2) tahap pekerjaan lapangan. (3) analisis data.

Teknik pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Pengecekan dilakukan dengan metode uji keabsahan data dan triangulasi sumber. Dalam upaya memperoleh data penelitian yang valid, objektif dan representatif, maka peneliti secara sistematis mendeskripsikan dan menganalisis rancangan studi eksplorasi dan dokumentasi untuk mendapatkan konsep dan teori implementasi kebijakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda, orang sebagai informan dalam arti sebagai subyek yang mengemukakan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan benda

merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penggunaan teknik triangulasi dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan data pada saat penggalan data. Data awal saat proses pendahuluan untuk mencari data-data yang bersifat deskriptif tentang implementasi kebijakan sekolah sekolah penggerak Triangulasi Teknik digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016: 274), maka diskusi dilakukan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan data yang dianggap benar kredibilitas data yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiyono, 2010).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Pemilihan data primer berdasarkan pada kapasitas subyek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh. Sedangkan yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepala SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung, pengawas, wakil kepala sekolah, guru, siswa, komite dan staf TU.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda, orang sebagai informan dalam arti sebagai subyek yang mengemukakan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Pemilihan data primer berdasarkan pada kapasitas subyek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh. Sedangkan yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepala SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung, pengawas, wakil kepala sekolah, guru, siswa, komite dan staf TU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini meliputi empat sub fokus implementasi kebijakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar dengan mengimplementasikan lima intervensi program sekolah penggerak sebagai berikut:

1. Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka Merdeka Belajar.

Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala sekolah telah melaksanakan komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi dengan baik. Sosialisasi dalam implementasi program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar kepada seluruh warga sekolah yang meliputi, guru, staf TU, siswa dan komite sekolah serta orang tua murid secara jelas dan konsisten dilaksanakan. Kapan kegiatan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Kepala sekolah telah melakukan diskusi dan komunikasi, serta dimusyawarahkan secara bersama dalam forum rapat, dicari solusi dari permasalahan yang dihadapi untuk ditemukan solusi dan menentukan tindak lanjut untuk perbaikan. Selain itu pendampingan konsultatif dan asimetris oleh kemendikbudristek melalui kegiatan Project Manageman Office (POM) oleh pelatih ahli tetap

dilaksanakan sampai tahun ketiga. Pendampingan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta oleh Pengawas Sekolah juga terus dilaksanakan secara terprogram dan pada saat pelaksanaan program sekolah penggerak. Hal ini bisa tercapai karena kepala sekolah bersama dewan guru dan staf TU di awal tahun telah membuat perencanaan program dengan menerapkan manajemen sekolah yang terdiri dari: Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC) atau perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan.

2. Implementasi Kebijakan Sumberdaya Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka Merdeka Belajar.

Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi diperoleh hasil bahwa:

Sumber daya manusia baik guru, karyawan dan murid berkomitmen melaksanakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar dengan maksimal. Hal ini bisa dilihat pada saat kepala sekolah menyampaikan komitmen bersama di murid. Semua warga sekolah mempunyai komitmen bersama untuk meningkatkan kompetensi diri masing untuk mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak. Guru dan TU mengikuti workshop dan IHT terkait dengan program. selain itu guru juga aktif mengikuti pelatihan mandiri di PMM, memanfaatkan Platform pembelajaran, mengikuti komunitas belajar serta melaksanakan kegiatan lesson study tentang pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid.

Sumberdaya Anggaran, tersedianya RKS dan RKAS sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sumberdaya anggaran menggunakan anggaran BOS yang dialokasikan untuk pelaksanaan program sekolah penggerak kurang lebih 75 %, bersumber dari BOS reguler dan BOS kinerja sebanyak Rp 648.450.000 dan komite Rp. 440.200.000 serta dukungan dari pihak lain berupa sumbangan tenaga, dan finansial dari orang tua.

Sumberdaya Peralatan, sudah memadi dalam pelaksanaan program sekolah penggerak seperti lingkungan belajar fisik dan teknologi digital. Bila memungkinkan untuk ditambahkan adalah LCD, Laptop, Komputer dan tab. Sarana dan prasarana yang mendukung program mendukung pelaksanaan sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar.

Sumberdaya kewenangan ,kepala sekolah memberikan kewenangan kepada pelaksana kegiatan sehingga guru dapat mengembangkan diri dengan berinovasi dan kreatif melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi kewenangannya sesuai dengan SK kepala sekolah.

3. Disposisi Atau Perilaku Implementasi Pebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka Merdeka Belajar.

Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi dapat di simpulkan bahwa adanya komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis dari kepala sekolah, guru, staf TU, murid dan komite dalam pelaksanaan P5. Semua warga sekolah berperan aktif dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar, bila ada kendala segera di evaluasi bersama dan diambil jalan keluarnya. Sikap demokratis dapat dilihat dalam pelaksanaan program dimana kepala sekolah sudah melibatkan guru dan murid dalam memilih tema proyek. Sedangkan untuk insetif belum ada dalam anggaran baik di BOS maupun komite. Sikap atau perilaku warga sekolah dalam implemenasi program sekolah penggerak menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Guru mengimplementasikan pembelajaran yang berdampak pada murid baik dikelas dan diluar kelas, dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sikap staf TU sangat mendukung pelaksaan program baik tenaga dan pemikiran. Komite sekolah sangat mendukung dengan anggaran dan juga tenaga.

4. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka

Merdeka Belajar.

Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen diperoleh hasil sebagai berikut: Adanya mekanisme dan struktur birokrasi bahwa semua warga sekolah berkomitmen bersama untuk mengimplementasikan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar. Kepala sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan program PSP melalui rangkaian proses manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan. Surat Keputusan tentang pembagian tugas juga diberikan untuk melibatkan guru dan karyawan terlibat dalam pelaksanaan program sesuai dengan kompetensi masing masing. Kepala sekolah memberikan tugas kepada guru dan staf TU sesuai dengan kompetensinya masing masing, sehingga guru dan staf TU dapat melaksanakan tugas dengan senang hati tanpa ada tekanan. Dengan demikian guru juga akan lebih kreatif dan inovatif untuk mengembangkan dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid. Salah satu contoh dari karya inovatif tim IT SMP Negeri 1 Tlogomulyo telah berhasil membuat LMS yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran oleh semua guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SMP Negeri 1 Tlogomulyo secara realita telah mengimplementasikan kebijakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar dan tahun ini memasuki tahun 2023 merupakan tahun ke-3. (2) mengetahui pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak Dalam Kerangka Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung melalui lima intervensi sekolah penggerak menunjukkan : (a) Pendampingan konsultatif dan asimetris oleh Kemendikbudristek , Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga , Pelatih Ahli, dan Pengawas Sekolah berjalan dengan baik dan terprogram (b) Penguatan SDM sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui IHT, workshop, pelatihan mandiri melalui PMM, dan komunitas belajar berjalan sangat baik, (c) Pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid dilaksanakan dengan baik dengan dilaksanakan supervise oleh kepala sekolah dan melalui Lesson Study serta refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran berdiferensiasi, (d) Perencanaan berbasis data dilaksanakan melalui evaluasi diri dan refleksi untuk menentukan tindak lanjut ,(e) Digitalisasi sekolah dengan membuat LMS SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung dapat diakses oleh semua guru dan murid yang mendukung proses pembelajaran berbasis IT.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi, teknik triangulasi diterapkan dalam penelitian kualitatif ini untuk mendapat data yang valid. Hasil penelitian menggambarkan hasil dari implementasi kebijakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar di SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung sebagai berikut

1. Komunikasi Pada Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar.

Sosialisasi kebijakan dalam implementasi kebijakan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya komunikasi kebijakan maka tidak tercapai tujuan kebijakan tersebut. Edward III dalam Sutoko (2010:8):

“...The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications...”

Aspek komunikasi sudah dilakukan dengan baik dengan memenuhi tiga indikator dalam

berkomunikasi, yaitu adanya transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi, kepala sekolah menyampaikan isi kebijakan kepada para pelaksana atau tim, sehingga anggota tim dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Hal ini tertuang dalam SK pembagian tugas, dan program sekolah penggerak. Kedua, kejelasan substansi kebijakan sudah dipahami oleh para pelaksana dengan baik. Kebijakan program sekolah penggerak dikomunikasikan kepada warga sekolah dan lingkungan sekitar dengan jelas, akurat dan konsisten. Yang terakhir adalah konsistensi, sekolah telah secara konsisten mengkomunikasikan aturan-aturan atau tata tertib kepada semua warga sekolah, mulai dari murid, guru dan staf TU. Dari hal yang sudah baik tersebut diatas perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal terlebih pada hal konsistensi. Hal yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi, belum semua guru, staf TU dan murid melaksanakan tugas mereka secara konsisten, perlunya motivasi internal bagi semua warga sekolah dalam melaksanakan program sekolah penggerak.

2. Sumberdaya pada Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak di SMP Negeri 1 Tlogomulyo, Temanggung

Merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. George C. Edwards III berpendapat meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka implementasi kebijakan sulit dilakukan dengan maksimal. Ketersediaan sumberdaya manusia yaitu guru dan staf TU meningkatkan kompetensi melalui IHT dan workshop. Selain itu guru juga membentuk komunitas belajar dan lesson study serta belajar secara mandiri melalui PMM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di lembaga SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung sudah memadai secara kualitas dan kuantitas memenuhi jumlah yang diharapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Sebagian besar guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik dalam proses pembelajaran di kelas dan projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Sumberdaya anggaran berpengaruh dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah menggunakan BOS Reguler dan BOS Kinerja serta sumbangan komite untuk kebutuhan pembelajaran, sponship dan bantuan masyarakat sekitar. Anggaran BOS Kinerja cukup fleksibel ini digunakan untuk kebutuhan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Meskipun dirasa anggaran masih kurang, namun hal ini cukup bisa membantu pelaksanaan program sekolah penggerak.

Untuk sumber daya peralatan pembelajaran sudah cukup lengkap, ruang kelas yang representatif untuk menunjang pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran juga sudah cukup baik, guru dan peserta didik menggunakan gadget/HP, koneksi internet/wifi, kuota internet, dan platform/aplikasi dan LMS serta platform yang digunakan untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam sumber daya kewenangan kepala sekolah memberikan kewenangan melalui SK pembagian tugas, dan implementor melaksanakan tugas sesuai tugas dan tanggung jawab masing masing.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada aspek sumber daya telah terpenuhi dengan baik, telah memenuhi empat indikator sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sedangkan, hal-hal yang diperlu tingkatan adalah sumber daya manusia di sekolah. Belum semua guru mempunyai kompetensi yang sama dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.

3. Disposisi pada Implementasi kebijakan pembelajaran yang berpihak pada murid.

Menurut Edward III dalam Wijaya (2012:21) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan

atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Disposisi merupakan hal krusial yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Sikap warga sekolah dalam hal ini guru dan staf TU sudah bekerja secara profesional untuk mewujudkan program merdeka belajar SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada aspek disposisi telah berjalan dengan baik. Hal yang perlu ditingkatkan adalah komitmen, ada beberapa guru, staf TU dan murid yang belum melaksanakan komitmen bersama dengan maksimal.

4. Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar.

Standar pelayanan pendidikan yang mendesak di laksanakan untuk mewujudkan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada murid, Pendidikan yang menuntun murid untuk mewujudkan cita-citanya diberikan dengan layak sesuai dengan capaian pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merealisasikan program sekolah penggerak aspek struktur birokrasi sudah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Project Management Office (PMO) yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah mengawal, mengevaluasi, mereview dan merefleksi bersama pelatih ahli.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada aspek struktur birokrasi telah terpenuhi dengan baik yaitu adanya mekanisme dan struktur birokrasi. Dengan adanya pendampingan dari pelatih ahli, dinas pendidikan, dan pengawas sekolah dapat menghindari adanya miskonsepsi terhadap pelaksanaan program sekolah penggerak.

Hal yang perlu ditingkatkan adalah mekanisme pelaksanaan program sekolah penggerak, serta perlunya meningkatkan motivasi intrinsik dari pelaksana program.

Dari hasil penelitian yang relevan menurut Fadilah (2019), kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate dengan membuat suatu perencanaan/perumusan program kemudian berkerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah serta menjalankan (implementasi program) dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap program yang dibuat sesuai dengan tujuan melalui hasil musyawarah (rapat) yang mana program tersebut adalah adanya visi dan misi, Tahfizul Al-Qur'an, sistem full day school dan Eksrakurikuler serta yang lainnya.

Menurut Jaleha (2018) implementasi kebijakan sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter siswa di MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penguatan pendidikan karakter sudah terlaksana dengan baik dilihat dari pengimplementasian nilai-nilai karakter yang dilakukan siswa. Namun, belum sepenuhnya maksimal masih membutuhkan penguatan pendidikan karakter lebih lanjut.

Menurut Sudarningsih (2016), implementasi kebijakan manajemen pengelolaan sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan mutu lulusan melalui pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kegiatan peningkatan mutu lulusan terutama dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi guru dalam mengajar, dilihat dari kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RRP, bahan ajar, media dan instrumen penelitian hasil belajar siswa.

Menurut Riyanto (2023) menggambarkan tentang realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 sebagai berikut: (a) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar PPDB Zonasi (b) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Penghapusan UN diubah menjadi AKM (c) Implementasi Kebijakan

Merdeka Belajar Fleksibilitas Pengelolaan BOS sudah dilaksanakan dengan kenaikan anggaran BOS. (d) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar RPP yang disederhanakan (e) Implementasi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka melalui sosialisasi, pembentukan tim pengembang kurikulum, penganggaran dan terwujudlah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sebagai bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebaharuan dari penelitian ini yaitu pada implementasi 5 intervensi program sekolah penggerak meliputi: pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, perencanaan berbasis data, pembelajaran paradigma baru dan digitalisasi sekolah. Hasil dari penelitian oleh Islamiah lebih menekankan pada sekolah dapat membuat program sesuai dengan kebutuhan SDM dan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Sedangkan menurut Fadilah dan Sudarningsih lebih menekankan pada peningkatan mutu Pendidikan. Menurut Jaleha menekankan pada Pendidikan karakter sedangkan menurut Riyanto pada implementasi Merdeka belajar melalui tim pengembang kurikulum dengan menyusun KOSP.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai pendukung data dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar melalui 5 intervensi yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah, telah berjalan dengan baik melalui perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan. Pendampingan oleh Pelatih ahli, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan PSP meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berjalan dengan baik terhindar dari miskonsepsi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Komunikasi Implementor Kebijakan Program Sekolah Penggerak telah dilaksanakan dengan baik, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi program dilaksanakan setiap ada informasi atau kebijakan baru melalui rapat dinas dan pada saat upacara bendera.
2. Sumberdaya dalam rangka Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar secara umum cukup memadai. Sumber daya manusia guru dan staf TU profesional dalam bekerja, dengan meningkatkan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti IHT, workshop, pelatihan mandiri melalui PMM dan komunitas belajar serta *lesson study* pembelajaran berdiferensiasi. Sumber daya anggaran bersumber dari BOS Reguler dan BOS Kinerja serta komite dapat diarahkan kepada kebutuhan program pembelajaran yang berdampak pada murid dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sumberdaya peralatan cukup memadai, sumber daya kewenangan yang sangat berperan sebagai penanggung jawab mengatur berjalannya program yang memiliki hak untuk menentukan keputusan dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan program.
3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi kebijakan program sekolah penggerak terlaksana dengan baik. Komitmen bersama antara Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala sekolah, guru, staf TU, komite. dan murid berjalan baik. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan program bekerja dengan maksimal, “menuntun” murid dengan beragam kompetensi untuk mewujudkan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila.
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembagian

tugas wewenang yang cukup jelas, sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan memahami tugasnya masing masing yang mendukung program berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadim Masaong, Sitti Roskina Mas, and Arifin Sukung (2023). Principle Learning Leadership on “Sekolah Penggerak” Programme International Journal of Management Studies and Social Science Research Diakses 11 Maret 2023 DOI: <https://doi.org/10.56293/IJMSSSR.2022.4544>
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,2012), hlm.88-89
- Aminudin, <https://uptdiklatukm.diskopukm.jatimprov.go.id/2021/09/27/poac-dalam-manajemen-konten-platform-pembelajaran-digital-2/> hari Rabu,6 Desember 2023.Jam 20.20WIB
- Arsyad, A. (2015). Media Pembelajaran (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Borg, W.R. and Gall, M.D. 1983. Educational Research. New York: Longman Inc
- Dinas Pendidikan DIY. (2011). Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Diakses dari <http://www.pendidika.diy.go.id/file/perda/Perda-no-5-2011.pdf> pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023. Jam 10.45 WIB.
- Direktorat Sekolah Menengah Pertama <https://penggerak-simpkb.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/portalprogramsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114551/Paparan-Program-Sekolah-Penggerak.pdf> hari Minggu , tanggal 30 April 2023. Jam 15.17 WIB.,
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Grindle, M.S. (1980). Politics and Policy Implementation in Third World.Princeton: Princeton University Press.
- Harahap. E. 2016. Visi Kepala Sekolah Sebagai Penggerak Mutu Pendidikan. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Vol. 1. No. 2. (<https://jurnal.univpgri.palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/1014> diakses pada tanggal 7 Maret 2023)
- Hardono, E., 2012. Kebijakan Publik.Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan Widya Karya
- Haryati, T., Widodo, J., Masrukhi, M., & Haryono, H. 2015. Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Integratif Prodi PPKN FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Civis, 5(2/JULI).
- Islamiyah, Nur Mawaddah. Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kota Bima, NTB). MS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Jaleha, J. (2018). Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Karakter Siswa di Mts Muhammadiyah I Tlogomas Kota Malang (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Kemendikbud. 2021. Kemendikbud Luncurkan Program Sekolah Penggerak. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023 <http://ditpsd.kemendikbud.go.id/artikel/detail/kemendikbud-luncurkan-program-sekolah-penggerak>
- Kemendikbud. 2021. Daftar Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Program Sekolah Penggerak. (<https://docplayer.info/202701882-Program-sekolah-penggerak.html> diakses pada tanggal 6 Maret 2023)
- Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMPN 2 Temanggung Tahun 2023. Temanggung. April 2023.
- Latief, M. A. (2009). Penelitian pengembangan. Karya Dosen Fakultas Sastra UM. Program Sekolah

- Penggerak 2021 (<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/> diakses pada tanggal 6 Maret 2023).
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2012. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadilah, N. U. R. (2019). Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Riyanto, Budi, Ngasbun Egar, and Ngurah Ayu Nyoman Murniati. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 12.1 (2023).
- Salahudin, A., & Alkrienciehie, I. (2013). Pendidikan Karakter (Pendidikan Berbasis Agama Dan Budaya Bangsa). Bandung: Pustaka Setia
- Sudarningsih, S. (2016). Implementasi manajemen pengelolaan sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP Muhammadiyah 1 Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sufyadi, Susanti and Harjatanaya, Tracey Yani and Tracey Yani, Pia and Satria, M. Rizky and Andianti, Ardanti and Herutami, Indriyati (2021) Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). Manual. Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Jakarta
- Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 224-225
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 233
- Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), hlm.129
- Suryadinata, N.S. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin, Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif, (Jakarta: Rineka Cipta,2008)
- Syafaruddin & Asrul, Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer (Bandung: Citra Pustaka Media, 2015).
- Taher, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- William N. Dunn, Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public, (Yogyakarta: Gajah Mada,1999).`